



LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU
(649601)

**Periode Yang Berakhir
30 Juni 2025**

**Jl. Garuda No 22 Palu, telp : (0451) 482131
email : skipm.palu@kkp.go.id**

 @BKIPMPalu

 Bkipm Palu

 @bkipmpalu

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada UPT BPPMHKP Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

CPalu, 14 Juli 2025

Kepala BPPMHKP Palu,



Hamzah, S.Pi, M.Si

NIP 19700701 199903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	19
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	43



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tingkat satker selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 14 Juli 2025
Kepala BPPMHKP Palu,



[Signature]
Amzah, S.Pi, M.Si
NIP 19700701 199903 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPPMHKP Palu 30 Juni 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.4.090.000 atau mencapai 7.91 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp51.700.000.

Realisasi Belanja Negara 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.2.255.155.367. atau mencapai 30,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.435.052.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.484.772.873 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp99.472.925; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.385.299.948; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 192.726.383 dan Rp. 14.292.046.490.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.4.090.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.2.656.308.511 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.652.218.511), Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp (2.652.218.511), sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (2.652.218.511),

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.8.159.035.907 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp (2.652.218.511), kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas senilai Rp.8.785.229.094 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar 6.133.010.583 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp14.292.046.490.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STASIUN KIPM PALU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 Juni 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA TAN	30 Juni 2025				30 Juni 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di atas (di bawah)	%	REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	51,700,000	4,090,000	(47,610,000)	7.91	14,409,130
Jum Pendpt Negara & Hibah		51,700,000	4,090,000	(47,610,000)	7.91	14,409,130
B. Belanja Negara	B.2.					
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3,636,585,000	1,553,610,905	(2,082,974,095)	42.72	990,755,872
2. Belanja Barang	B.2.2.	3,798,467,000	701,544,462	(3,096,922,538)	18.47	739,390,169
3. Belanja Modal	B.2.3.	-	-	-	0.00	-
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Negara		7,435,052,000	2,255,155,367	(5,179,896,633)	30.33	1,730,146,041

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

. NERACA

STASIUN KIPM PALU
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 Juni 2025	2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	60,000,000	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.2	0	0
Piutang Bukan Pajak		0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		0	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)		0	0
Persediaan	C.1.3	39,472,925	71,610,929
Jumlah Aset Lancar		99,472,925	71,610,929
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	8,662,090,000	4,445,700,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	7,250,386,109	3,570,396,599
Gedung dan Bangunan	C.2.3	7,188,682,537	4,921,221,301
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	67,193,000	67,193,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(8,783,051,698)	(4,892,849,677)
Jumlah Aset Tetap		14,385,299,948	8,111,661,223
Aset Lainnya	C.2		
Aset Lain-lain	C.2.7	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.2.8	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		14,484,772,873	8,183,272,152
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3		
Utang Kepada pihak Ke tiga	C.3.1	128,302,247	24,236,245
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.3.2	4,424,136	0
Uang Muka KPPN	C.3.3	60,000,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		192,726,383	24,236,245
JUMLAH KEWAJIBAN		192,726,383	24,236,245
EKUITAS			
Jumlah Ekuitas	C.4	14,292,046,490	8,159,035,907
	C.4.1	14,292,046,490	8,159,035,907
JUMLAH EKUITAS DANA		14,292,046,490	8,159,035,907
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		14,484,772,873	8,183,272,152

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN KIPM PALU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4,090,000	14,335,000
JUMLAH PENDAPATAN		4,090,000	14,335,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,646,537,152	1,040,809,666
Beban Persediaan	D.3	84,522,826	18,006,900
Beban Barang dan Jasa	D.4	579,088,063	340,154,170
Beban Pemeliharaan	D.5	62,166,759	255,531,726
Beban Perjalanan Dinas	D.6	69,536,806	120,240,348
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	214,456,905	206,039,170
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0	0
Jumlah Beban Operasional		2,656,308,511	1,980,781,980
JUMLAH BEBAN		2,656,308,511	1,980,781,980
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(2,652,218,511)	(1,966,446,980)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah surplus (Defisit) pelepasan aset non lancar		0	0
Surplus(Defisit) dari non kegiatan	D.11	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lain	D.12	0	0
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus(Defisit) dari kegiatan non operasional Lainnya		0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON		0	0
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.15	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(2,652,218,511)	(1,966,446,980)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STASIUN KIPM PALU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024
EKUITAS AWAL	E.1	8,159,035,907	10,012,273,017
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,652,218,511)	(1,966,446,980)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVAL	E.5	-	-
LAIN LAIN	E.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	8,785,229,094	1,717,687,086
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		6,133,010,583	(248,759,523)
EKUITAS AKHIR		14,292,046,490	9,763,513,494

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu yang kemudian disingkat nomenklaturnya menjadi BPPMHKP Palu didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 23/PERMEN-KP/2015, Stasiun KIPM Palu yang berkedudukan di Jalan Garuda No 22 mempunyai tugas Menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas Stasiun KIPM Palu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Kebijakan teknis pada tahun 2019 antara lain pemeriksaan media pembawa dengan organoleptik dan pelaksanaan Inpres 01 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Melalui pengawasan terpadu terhadap mutu dan kesehatan pangan.
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- d. Pelaksanaan administrasi UPT BKIPM.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui BKIPM.

Melalui peran Kantor Stasiun KIPM Palu di Sulawesi Tengah diharapkan kualitas Laporan Keuangan Satker dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 30 September 2024 dan 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

<i>Keuangan</i>	keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Palu). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
<i>Basis Akuntansi</i>	<p>A.3 Basis Akuntansi</p> <p>Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.</p> <p>Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>
<i>Dasar Pengukuran</i>	<p>A.4. Dasar Pengukuran</p> <p>Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan UPT Stasiun KIPM Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.</p> <p>Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.</p> <p>Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.</p>
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	<p>A.5. Kebijakan Akuntansi</p> <p>Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TW III Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah</p>

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai

yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Stasiun KIPM Palu memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.435.052.000 Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal sebanyak 3 kali yang disebabkan adanya Penghematan belanja pemerintah berupa Revisi Blokir dan Revisi Buka Blokir, Revisi Penyesuaian POK/penyesuaian halaman III DIPA. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	51.700.000	51.700.000
Jumlah Pendapatan	10.750.000	51.700.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.636.585.000	3.636.585.000
Belanja Barang	3.798.467.000	3.798.467.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	7.435.052.000	7.435.052.000

Realisasi Pendapatan
Rp4.090.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp4.090.000 atau mencapai 7.91 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 51.700.000. Pendapatan di satuan kerja lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi dan penerimaan kembali belanja pegawai TYAL, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan jasa karantina perikanan	0	0	0.00
2. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	51,700,000	4,090,000	7.91
3. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	0	0.00
4. Penerimaan kembali belanja Pegawai TAYL	0	0	0.00
5. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0.00
Jumlah	51,700,000	4,090,000	7.91

Realisasi Pendapatan Periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada periode 30 juni 2025 mengalami Penurunan **250,49%** dari realisasi pendapatan Periode 2024. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan/Perpindahan pendapatan PNBP Pendapan Jasa Karantina dan dan Pengujian Sertifikasi yang dialihkan ke BKI,

Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	2,340,000	100.00
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
3. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	-	-
4. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
5. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	4,090,000	11,995,000	(193.28)
Jumlah Pendapatan	4,090,000	14,335,000	(250.49)

Realisasi Belanja Rp
2.255.155.367

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 2.255.155.367 atau 30.33% dari anggaran belanja sebesar Rp. 7.435.052.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2025
(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3,636,585,000	1,553,610,914	
Belanja Barang	3,798,467,000	701,544,462	
Belanja Modal	0	0	
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	7,435,052,000	2,255,155,376	30.33
Pengembalian Belanja		9	0
Belanja Netto	7,435,052,000	2,255,155,367	30.33

Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 mengalami Kenaikan sebesar (23,28) persen dibandingkan realisasi belanja 30 Juni 2024. Hal ini dikarenakan antara lain :

1. Kenaikan belanja pegawai disebabkan berpindahnya alokasi anggaran belanja pegawai BPPMHKP Luwuk Banggai ke BPPMHKP Palu
2. kenaikan belanja barang disebabkan berpindahnya alokasi anggaran belanja barang BPPMHKP Luwuk Banggai ke BPPMHKP Palu.
3. Tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2025
4. Tidak adanya bantuan social tahun 2025

Perbandingan Realisasi Belanja
30 juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI PER 30 Juni 2025	REALISASI PER 30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,553,610,905	990,755,872	36.23
Belanja Barang	701,544,462	739,390,169	(5.39)
Belanja Modal	0	-	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah Belanja	2,255,155,367	1,730,146,041	23.28

Belanja Pegawai
Rp1.646.37.152

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.646.37.152 dan Rp.990.755.872. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 30 Juni 2025 mengalami Kenaikan sebesar 36,23 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Berpindahnya alokasi anggaran BPPMHKP Luwuk Banggai ke BPPHKP Palu.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	654,716,500	410,299,400	37.33
Belanja pembulatan gaji PNS	8,568	6,879	19.71
Belanja Tunj Suami/ Istri	52,272,800	33,963,840	35.03
Belanja Tunj Anak	13,471,658	7,899,670	41.36
Belanja Tunj Struktural PNS	16,200,000	10,080,000	37.78
Belanja Tunj Fungsional	9,720,000	7,145,000	26.49
Belanja Tunj PPh PNS	6,168,804	3,108,440	49.61
Belanja Tunj Beras PNS	34,544,340	23,246,820	32.70
Belanja Uang Makan PNS	60,306,000	44,191,000	26.72
Belanja Tunj Umum PNS	21,510,000	12,310,000	42.77
Belanja Uang Lembur	0	0	(100.00)
Belanja Tunjkin Pegawai	721,726,604	425,005,875	41.11
Belanja Gaji PPPK	31,186,644	8,707,038	72.08
BelanjaUang Lembur PPPK	0	0	(100.00)
belanja Tukin PPPK	24,705,234	4,792,283	80.60
Jumlah Belanja Kotor	1,646,537,152	990,756,245	39.83
Pengembalian	-	373	
Jumlah Belanja Bersih	1,646,537,152	990,755,872	39.83

Belanja Barang Rp
701.544.462

B.4 Belanja Barang

1. Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 701.544.462 dan Rp. 739.390.169 Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 mengalami penurunan 5,39 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
30 juni 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	30 Juni 2024	Naik(Turun %)
Belanja Barang Operasional	278,369,497	130,647,881	53.07
Belanja Barang Non Operasional	3,000,000	2,652,000	11.60
Belanja Jasa	285,578,811	213,617,714	25.20
Belanja Pemeliharaan	52,003,048	255,531,726	(391.38)
Belanja Barang Persediaan	13,056,300	16,700,500	(27.91)
Belanja Perjalanan Dalam	69,536,806	120,240,348	(72.92)
Jumlah Belanja Kotor	701,544,462	739,390,169	(5.39)
Pengembalian belanja	-	-	
Jumlah Belanja Bersih	701,544,462	739,390,169	(5.39)

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0.00

Belanja Modal Tanah
Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Tanah 30 juni 2025. Hal ini disebabkan antara lain: Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Tanah tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
NIHIL	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Tidak terdapat belanja Gedung dan Bangunan di Kantor satker BPPMHKP Palu pada Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
N I H I L	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025.

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30-Jun-25	30-Jun-24	Naik (Turun) %
N I H I L	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Belanja Modal Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya per 30 Juni 2025

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	%
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial pada per 30 Juni 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	%
Belanja Bantuan sosial	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Aset Lancar Rp.
99.472.925

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun BPPMHKP Palu per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 99.472.925 dan Rp. 71.610.929

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp60.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada UPT Stasiun KIPM Palu per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000 dan Rp60.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Uang Tunai	36.138.612	31.860.313
Uang di Bank	19.437.252	28.139.687
Kuitansi UP yang belum di SPM kan	4.424.136	0
Jumlah	60.000.000	60.000.000

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1.4. Piutang PNBP

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Rincian Piutang Bukan Pajak
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2025
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
30 Juni 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
6.		-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BPPMHKP Palu per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		-

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka BPPMHKP Palu per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
N I H I L	0	0
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima UPT Stasiun KIPM Palu per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam rupiah)

Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
N I H I L	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp. 39.472.925

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 39.472.925 dan Rp8.882.326 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam rupiah)

No	Persediaan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Barang Konsumsi	6,065,785	3,778,151
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	6,189,300	69,375
4	Pita, Cukai, Materai dan Legis	-	-
5	Bahan Baku	27,217,840	5,034,800
6	Persediaan lainnya	-	-
Jumlah		39,472,925	8,882,326

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp. 14.385.299.948

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap UPT BPPMHKP Palu – per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 14.385.299.948 dan Rp8.111.661.223

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada UPT BPPMHKP Palu berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp8.662.090.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Daerah/UPT BPPMHKP Palu – per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.662.090.000 dan Rp.4.445.700.000, Transfer Masuk Tanah dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari BPPMHKP Luwuk ke BPPMHKP Palu, Sesuai BAST nomor:B.91/SKIPM.LB/PL.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2025	Rp 4,445,700,000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk dari UPT Luwuk Banggai	Rp 4,216,390,000
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	Rp -
Saldo per 30 Juni 2025	Rp 8,662,090,000
Akumulasi Penyusutan s.d.30 juni 2025	Rp -
Nilai Buku per 30 Juni 2025	Rp 8,662,090,000

Rincian saldo Tanah per 30 juni 2025 adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	LUAS	NILAI
1	Palu	1.740 M2	4,445,700,000
2	Luwuk Banggai	1.600 M2	4,216,390,000

Peralatan dan
Mesin
Rp 7.250.386.109

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 7.250.386.109 dan Rp Rp5.200.909.531 Transfer Masuk Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya Transfer Masuk Tanah dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari BPPMHKP Luwuk ke BPPMHKP Palu, , Sesuai BAST nomor:B.91/SKIPM.LB/PL.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Per 01 Januari 2025	3,570,396,599
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk dari BPPMHKP Luwuk Banggai	3,679,989,510
mutasi kurang	
Penghapusan	-
Transfer keluar	-
Saldo per 30 Juni 2025	7,250,386,109
Akumulasi penyusutan s.30 Juni 2025	(6,688,784,461)
Nilai Buku Per 30 juni 2025	561,601,648

Rincian Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan
Bangunan
Rp.
7.188.682.537

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 7.188.682.537 dan Rp 6,194,588,601, Transfer Masuk Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari BPPMHKP Luwuk ke BPPMHKP Palu, Sesuai BAST nomor: B.91/SKIPM.LB/PL.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025

(dalam rupiah)

Saldo Per 01 Januari 2025	4,921,221,301
Mutasi Tambah	
transfer masuk dari BPPMHKP Luwuk Banggai	2,267,461,236
mutasi kurang	-
Penghapusan	-
Transfer keluar	-
Saldo per 30 juni 2025	7,188,682,537
Akumulasi penyusutan s.d 30 juni 2025	(2,073,335,596)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	5,115,346,941

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi

Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 67,193,000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 67,193,000 dan Rp 94,142,000, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2025	67,193,000
Mutasi tambah:	
Transfer Keluar:	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 Juni 2025	67,193,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(20,931,641)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	46,261,359

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 Juni 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam rupiah)

No.	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.	NIHIL				
2.					
	Jumlah				

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.
8.783.051.698)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (8.783.051.698) dan Rp.6.410.020.534

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	8.662.090.000	0	8.662.090.000
2.	Peralatan dan Mesin	7.250.386.109	(6.688.784.461)	696.020.040
3.	Gedung dan Bangunan	7.188.682.537	(2.073.335.596)	5.194.077.227
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.193.000	(20.931.641)	47,569,586
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	23.168.351.646	(8.783.051.698)	14.385.299.948

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang. Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

**C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) UPT BPPMHKP Palu – per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1.	BPPMHKP Palu	-	-
2.	BPPMHKP Luwuk Banggai	-	-
	Jumlah	0	0

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian TPA per Satker Tahun 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang TPA
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1.	Stasiun KIPM Palu	-	-
2.	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	-	-
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang UPT BPPMHKP Palu – per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang 30 Juni 2025*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya UPT BPPMHKP Palu – per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Aset Tak Berwujud 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.		0
2.		0
	Jumlah	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada UPT Stasiun KIPM Palu – adalah sebagai berikut.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Saldo Per 30 Juni 2025	-
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	-

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPPMHKP Palu – dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 30 Juni 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 30 Juni 2025	-
Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku Per 30 Juni 2025	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya 30 Juni 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.		0	0	0
2.		0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp 192.726.383

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek UPT BPPMHKP Palu – per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 192.726.383 dan Rp.121.121.794

Uang Muka dari
KPPN
Rp60.000.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000 dan Rp0. merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka

kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup BPPMHKP Palu adalah sebagai berikut:

*Rincian Uang Muka dari KPPN
30 Juni 2025*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2025
1.	BPPMHKP Palu	60.000.000
2.		0
3.		0
	Jumlah	0

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp.128.302.247*

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing sebesar Rp 128.302.247 dan Rp. 24,236,245 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup UPT BPPMHKP Palu – per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
30 Juni 2025*

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Gaji Pegawai	92.926.247	Pembayaran gaji pegawai bulan juli 2025
2.	Gaji P3K	3.5376.000	Pembayaran gaji P3K bulan juli
	Total	128.302.247	

*Pendapatan Diterima di Muka
Rp0*

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka
30 Juni 2025*

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah		

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp 128.302.247

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 128.302.247 dan Rp. 24,236,245, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	128.302.247	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	24,236,245
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	128.302.247	24,236,245

Utang yang belum ditagihkan Rp 4.424.136

C.5.5. Utang yang belum ditagihkan

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 4.424.136 dan Rp. 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kuitansi yang belum SP2D	4.424.136	-
Jumlah	4.424.136	0

Ekuitas Rp. 14.292.046.490

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.292.046.490 dan Rp.9.763.513.494 Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp.4.090.000
0

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.4.090.000 dan Rp14.335.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2025	2024	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Jasa Sensor Karantina	-	2,340,000	-100.00
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi	4,090,000	11,995,000	-193.28
Mesin	-	-	0.00
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	4,090,000	14,335,000	-250.49

Pendapatan Jasa merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa pemeriksaan laboratorium terhadap produk perikanan yang akan dilalulintaskan. Pada Periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar 250,49%. Hal ini disebabkan pengujian jasa sensor karantina dialihkan ke BKI.

Beban
Pegawai Rp
1.553.610.905

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.553.610.905 dan Rp.990.756.245. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	654,716,500	410,299,400	37.33
Belanja pembulatan gaji PNS	8,568	6,879	19.71
Belanja Tunj Suami/ Istri	52,272,800	33,963,840	35.03
Belanja Tunj Anak	13,471,658	7,899,670	41.36
Belanja Tunj Struktural PNS	16,200,000	10,080,000	37.78
Belanja Tunj Fungsional	9,720,000	7,145,000	26.49
Belanja Tunj PPh PNS	6,168,804	3,108,440	49.61
Belanja Tunj Beras PNS	34,544,340	23,246,820	32.70
Belanja Uang Makan PNS	60,306,000	44,191,000	26.72
Belanja Tunj Umum PNS	21,510,000	12,310,000	42.77
Belanja Uang Lembur	0	0	(100.00)
Belanja Tunjkin Pegawai	721,726,604	425,005,875	41.11
Belanja Gaji PPPK	31,186,644	8,707,038	72.08
Belanja Uang Lembur PPPK	0	0	(100.00)
belanja Tukin PPPK	24,705,234	4,792,283	80.60
Jumlah Belanja Kotor	1,646,537,152	990,756,245	39.83
Pengembalian	-	373	
Jumlah Belanja Bersih	1,646,537,152	990,755,872	39.83

Beban
Persediaan
Rp 84.522.826

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 84.522.826 dan Rp.16.700.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024
(dalam Rupiah)

No	Persediaan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	Beban Persediaan Konsumsi	12,586,920	16,700,500
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Legis	-	-
5	Beban Persediaan bahan baku	71,935,906	-
6	Persediaan lainnya	-	-
	Jumlah	84,522,826	16,700,500

Beban Barang
dan Jasa Rp
Rp 579.088.063

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.579.088.063 dan Rp.346.917.595. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau

jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peralihan anggaran dari UPT BBPMHKP Luwuk Banggai ke BPPMHKP Palu adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	274,867,900.	104,448,181.	62.00
Beban Penambah daya tahan tubuh	0.	0.	-
Beban Pengiriman Surat Dinas	86,600.	469,000.	(81.54)
Beban Honor Operasional Satker	32,821,000.	21,189,000.	54.90
Beban Barang Operasional Lainnya	6,969,997.	4,541,700.	53.47
Beban Barang Ops - Penanganan Covid19	-	-	-
Beban Bahan	0.	340,000.	(100.00)
Beban Honor Output Kegiatan	0.	2,312,000.	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000.	0.	(100.00)
Beban Langganan Listrik	71,698,895.	91,128,660.	(21.32)
Beban Langganan Telepon	40,679,671.	15,809,054.	157.32
Beban Langganan Air	80,000.	420,000.	(80.95)
Beban Sewa	0.	0.	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	0.	0.	-
Beban Jasa Lainnya	148,884,000.	106,260,000.	40.11
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Jumlah	579,088,063	346,917,595	40.09

Beban
Pemeliharaan
Rp62.166.759

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp62.166.759 dan Rp255.531.726. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan biaya pemeliharaan disebabkan adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada pemblokiran anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik / Turun
1	Beban Pemeliharaan Gedung bangunan	-	197,002,125.	100.00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,427,184	58,529,601.	5.30
3	Beban Persediaan untuk pemeliharaan	1,042,000	0.	100.00
4	Beban Persediaan suku cadang	5,697,575	0.	-
Jumlah		62,166,759	255,531,726	75.67

Beban
Perjalanan
Dinas Rp
69.536.806

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 69.536.806 dan Rp.120.240.348. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya efisiensi dan penghematan anggaran K/L, Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	20,981,683	41,049,572.	(95.64)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,050,000.	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	48,555,123	78,140,776.	(60.93)
Jumlah	69,536,806	120,240,348	(72.92)

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat

30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
N I H I L			
Jumlah Beban			

Beban
Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
	N I H I L		
Jumlah Beban			

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi Rp
214.456.905

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 214.456.905 dan Rp.206.039.170. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	134.418.392	138.060.878	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.730.286	66.267.841	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.308.227	1.710.451	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	
Jumlah Penyusutan	214.456.905	206.039.170	(104,08)
Beban Amortisasi Software	0	0	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
Jumlah Beban	214.456.905	206.039.170	(104,08)

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Kegiatan Non
Operasional
Rp(0)

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024	%
Pendapatan pelepasan asset non Lancar	-	-	-
Beban pelepasan asset non lancar	-	-	-
Beban dari keg. Non operasional lainnya	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah Beban	0	0	0

Pos Luar
Biasa Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 30 2025 dan 30 Juni 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp 8.159.035.907*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.159.035.907 dan Rp.10.012.273.017

*Defisit LO
Rp (2.652.218.511)*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp (2.652.218.511) dan Rp(1.966.446.980) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.1.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0*

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan 30 Juni 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

*Selisih Revaluasi Aset
Rp0*

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(0).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 30 Juni 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp371

Koreksi ini merupakan koreksi perbaikan penyisihan piutang tidak tertagih. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut (Dokumen Terlampi)

Rincian Koreksi Lain-lain 30 Juni 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Lainnya	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp8.785.229.094

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 8.785.229.094 dan Rp.1.717.687.086

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas 30 Juni 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(4.090.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.255.155.367
Transfer Masuk	6.534.163.727
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	8.785.229.094

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp.4.090.000 sedangkan DKEL sebesar Rp 2.255.155.367.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 juni 2025 sebesar Rp. 6.534.163.727 yang berasal dari Transfer masuk Aset BPPMHKP Luwuk Banggai ke BPPMHKP Palu terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Aset Tanah, Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin	BPPMHKP Luwuk Banggai	6.534.163.727
Jumlah			

Transfer Keluar TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.			
Jumlah			

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung 30 Juni 2025

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.		Uang	
		Barang	
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			

*Ekuitas Akhir Rp.
14.292.046.490*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 14.292.046.490 dan Rp.9.763.513.494

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 30 juni 2025 telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN melalui aplikasi SAKTI dan SPAN dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Stasiun KIPM Palu dan Stasiun KIPM Luwuk Banggai sebesar Rp. 128.302.247 yang terdiri Pembayaran Gaji pegawai Rp. 92.926.247 bulan juli 2025, dan Gaji P3K Rp. 3.5376.000 Bulan juli 2025.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

- terdapat Kuitansi yang belum diSP2D Rp. 4.424.136.
- Program Prioritas Nasional tahun 2025 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan lingkup BPPMKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp365.000.000,- dan realisasi sebesar Rp7.500.000,- atau 2,05% dari pagu, dengan rincian disajikan pada tabel realisasi anggaran belanja kegiatan Prioritas Nasional (PN) satker BPPMHKP Palu per 30 Juni 2025, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena adanya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya (Blokir).

Tabel 34
Program Prioritas Nasional TA.2025

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	Rp.110.000.000	Rp. 0	0,00
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	Rp.90.000.000	Rp.0	0,00
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp.20.000.000	Rp.0	0,00
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan	Rp.80.000.000	Rp.6.000.000	7,50

Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian Mutu	Rp.25.000.000	Rp.0	0,00
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	Rp.31.000.000	Rp.1.500.000	4,84
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	Rp.9.000.000	Rp.0	0,00
Total	Rp.365.000.000	Rp.7.500.000	2,05

Berdasarkan Keputusan Kepala BPPMHKP Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.001/SKIPM.PALU/KU.110/I/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Stasiun KIPM Palu sebagai berikut: Pejabat Pembuat Komitmen : Hamzah, S.Pi,M.Si Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM: Rahma Tenri Aben, SE, Bendahara Pengeluaran : Muchlis, S.AP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 1:29 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,090,000	14,335,000	(10,245,000)	(71.468)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,090,000	14,335,000	(10,245,000)	(71.468)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,090,000	14,335,000	(10,245,000)	(71.468)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,646,537,152	1,040,809,666	605,727,486	58.198
Beban Persediaan	84,522,826	18,006,900	66,515,926	369.391
Beban Barang dan Jasa	579,088,063	340,154,170	238,933,893	70.243
Beban Pemeliharaan	62,166,759	255,531,726	(193,364,967)	(75.672)
Beban Perjalanan Dinas	69,536,806	120,240,348	(50,703,542)	(42.168)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 1:29 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	214,456,905	206,039,170	8,417,735	4.086
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,656,308,511	1,980,781,980	675,526,531	34.104
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,652,218,511)	(1,966,446,980)	(685,771,531)	34.874
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,652,218,511)	(1,966,446,980)	(685,771,531)	34.874
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,652,218,511)	(1,966,446,980)	(685,771,531)	34.874

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAMZAH

IV.a 197007011999031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 21/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 1:30 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	8,159,035,907	10,012,273,017	(1,853,237,110)	(18.51)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,652,218,511)	(1,966,446,980)	(685,771,531)	34.87
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	371	(371)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	371	(371)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,785,229,094	1,717,687,086	7,067,542,008	411.46
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6,133,010,583	(248,759,523)	6,381,770,106	(2,565.44)
EKUITAS AKHIR	14,292,046,490	9,763,513,494	4,528,532,996	46.38

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAMZAH

IV.a 197007011999031003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU 649601

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 1:30 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	7,435,052,000	2,255,155,367	(5,179,896,633)	30.33	3,485,935,000	1,730,146,041	(1,755,788,959)	49.63
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



[Signature]
HAMZAH
IV.a 197007011999031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 1:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0	60,000,000	0.00
Persediaan	39,472,925	71,610,929	(32,138,004)	(44.88)
JUMLAH ASET LANCAR	99,472,925	71,610,929	27,861,996	38.91
ASET TETAP				
Tanah	8,662,090,000	4,445,700,000	4,216,390,000	94.84
Peralatan dan Mesin	7,250,386,109	3,570,396,599	3,679,989,510	103.07
Gedung dan Bangunan	7,188,682,537	4,921,221,301	2,267,461,236	46.08
Jalan, Irigasi dan Jaringan	67,193,000	67,193,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(8,783,051,698)	(4,892,849,677)	(3,890,202,021)	79.51
JUMLAH ASET TETAP	14,385,299,948	8,111,661,223	6,273,638,725	77.34
JUMLAH ASET	14,484,772,873	8,183,272,152	6,301,500,721	77.00
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	128,302,247	24,236,245	104,066,002	429.38
Utang Yang Belum Ditagihkan	4,424,136	0	4,424,136	0.00
Uang Muka dari KPPN	60,000,000	0	60,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	192,726,383	24,236,245	168,490,138	695.20
JUMLAH KEWAJIBAN	192,726,383	24,236,245	168,490,138	695.20
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,292,046,490	8,159,035,907	6,133,010,583	75.17
JUMLAH EKUITAS	14,292,046,490	8,159,035,907	6,133,010,583	75.17
JUMLAH EKUITAS	14,292,046,490	8,159,035,907	6,133,010,583	75.17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,484,772,873	8,183,272,152	6,301,500,721	77.00

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAMZAH

197007011999031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 1:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	6,065,785	0
0.0	117114	Suku Cadang	6,189,300	0
0.0	117131	Bahan Baku	27,217,840	0
0.0	131111	Tanah	8,662,090,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,250,386,109	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,188,682,537	0
0.0	134112	Irigasi	67,193,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,688,784,461
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,073,335,596
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	20,931,641
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	92,926,247
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	35,376,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	4,424,136
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	60,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,255,155,367
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,090,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,534,163,727
0.0	391111	Ekuitas	0	8,159,035,907
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	4,090,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	654,716,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8,568	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	52,272,800	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,471,658	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,720,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,168,804	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	34,544,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	60,306,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	21,510,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	25,729,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	664	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,620,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	651,780	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	3,185,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	721,726,604	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24,705,234	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	274,867,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 21/07/25 7:15 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 1:31 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32,821,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	6,969,997	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	71,698,895	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	40,679,671	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	80,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	148,884,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,427,184	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	20,981,683	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	48,555,123	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	134,418,392	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	78,730,286	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,308,227	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	12,586,920	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,042,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	5,697,575	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	71,935,906	0
JUMLAH			25,928,223,082	25,928,223,082

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAMZAH

IV.a 197007011999031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 21/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 21/07/25 1:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,255,155,367
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,090,000	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	4,090,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	581,399,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,597	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	46,416,440	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11,960,172	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,640,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,153,135	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	30,706,080	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	60,306,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,115,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	22,870,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	592	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,440,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	579,360	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	3,185,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	721,726,604	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24,705,234	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	238,491,900	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86,600	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	32,821,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,969,997	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,056,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	93,426,795	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	43,065,516	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	202,500	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	148,884,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,003,048	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,981,683	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	48,555,123	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9
JUMLAH			2,259,245,376	2,259,245,376

Keterangan :

FINAL

PALU, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAMZAH

197007011999031003

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 032
UAKPB : 649601

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 21/07/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 21/07/25 1:32 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		3,815	8,662,090,000	0	0	0	8,662,090,000
20101	TANAH PERSIL	-	3,815	8,662,090,000	0	0	0	8,662,090,000
132111	Peralatan dan Mesin		446	7,250,386,109	(3,223,947,629)	(3,464,836,832)	(6,688,784,461)	561,601,648
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	17	1,478,017,000	(741,600,856)	(727,701,857)	(1,469,302,713)	8,714,287
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	4	18,093,000	(15,593,000)	(2,500,000)	(18,093,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	38	229,795,600	(200,293,600)	(29,502,000)	(229,795,600)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	170	683,454,490	(317,071,156)	(260,752,139)	(577,823,295)	105,631,195
30601	ALAT STUDIO	-	11	163,691,614	(127,445,614)	(17,846,000)	(145,291,614)	18,400,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	5	29,003,660	(24,978,800)	(2,012,430)	(26,991,230)	2,012,430
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	3	311,461,100	(300,081,100)	(11,380,000)	(311,461,100)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	43	86,746,440	(45,844,776)	(23,139,444)	(68,984,220)	17,762,220
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	92	3,709,572,205	(1,171,350,702)	(2,162,094,687)	(3,333,445,389)	376,126,816
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	4	56,513,000	0	(56,513,000)	(56,513,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	29	302,892,700	(145,445,850)	(124,492,150)	(269,938,000)	32,954,700
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	14	151,258,300	(108,425,175)	(42,833,125)	(151,258,300)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	13	25,080,000	(25,080,000)	0	(25,080,000)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	3	4,807,000	(737,000)	(4,070,000)	(4,807,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		12	7,188,682,537	(1,649,278,634)	(424,056,962)	(2,073,335,596)	5,115,346,941
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	10	6,887,920,537	(1,605,918,629)	(413,050,579)	(2,018,969,208)	4,868,951,329
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2	300,762,000	(43,360,005)	(11,006,383)	(54,366,388)	246,395,612
134112	Irigasi		2	67,193,000	(19,623,414)	(1,308,227)	(20,931,641)	46,261,359
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	-	1	16,500,000	(6,513,159)	(434,210)	(6,947,369)	9,552,631
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	50,693,000	(13,110,255)	(874,017)	(13,984,272)	36,708,728
JUMLAH			4,275	23,168,351,646	(4,892,849,677)	(3,890,202,021)	(8,783,051,698)	14,385,299,948

Palu, 21 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Stasiun KIPM Palu



Hamzah, S.Pi, M.Si
19700701 199903 1 003